

Percepat Penurunan Stunting, Bank Indonesia Kalimantan Selatan Serahkan Bantuan Program Sosial Bank Indonesia di Barito Kuala



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/30/percepat-penurunan-stunting-bi-kalsel-serahkan-bantuan-psbi-di-batola>

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung upaya percepatan penurunan stunting guna menyokong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk penyerahan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), bertempat di Kantor Kecamatan Tabunganen, Barito Kuala, Senin (29/5).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo mengatakan, PSBI adalah program sosial yang dilakukan BI secara sistematis dan terencana melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial.

“Bantuan PSBI untuk mempercepat penurunan stunting merupakan bagian yang terintegrasi dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkesinambungan,” tutur Wahyu.

Isu stunting telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan mengungkap, angka prevalensi stunting di Kalsel menunjukkan perbaikan. Yakni dari semula 30% pada 2021, menjadi 24,6% pada 2022.

Kendati demikian, angka prevalensi stunting Kalsel pada tahun 2022 tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 21,6%. Hal itulah yang melandasi pemikiran BI untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel.

Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Barito Kuala, Mujiyat mengapresiasi sinergi dan dukungan yang diberikan BI untuk penanganan stunting. Pihaknya juga berharap PSBI bisa mempercepat penurunan angka stunting sesuai targetnya.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka stunting agar target 14% bisa dicapai pada 2024. Untuk itu, kami mengapresiasi dukungan yang BI berikan guna mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Barito Kuala,” ucap Mujiyat.

Senada dengan itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalsel yang juga selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalsel, Hj. Raudatul Jannah mengatakan, dukungan yang BI berikan sangat tepat sasaran mengingat Barito Kuala adalah daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel.

“Dengan tingkat prevalensi stunting sebesar 33,6%, Barito Kuala menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel. Untuk itu, kami mengapresiasi upaya BI mempercepat penurunan stunting melalui penyerahan bantuan PSBI,” ujar istri Gubernur Kalsel itu.

Total nilai PSBI yang diserahkan BI Kalsel sebesar Rp230 juta, terdiri dari empat jenis bantuan. Pertama, intervensi gizi spesifik berupa susu bagi baduta (bayi di bawah usia dua tahun) yang menderita stunting. Kedua, intervensi sensitif berupa alat kesehatan dan alat permainan edukatif untuk empat fasilitas kesehatan Barito Kuala, masing-masing berlokasi di Kecamatan Alalak, Belawang, Tabukan, dan Tabunganen.

Ketiga, intervensi sensitif berupa instalasi jamban komunal untuk sanitasi bagi kelompok masyarakat di Desa Tabunganen Pemurus. Terakhir, ada pula intervensi sensitif berupa instalasi pipa Pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) bagi kelompok masyarakat di Desa Samuda.

Selain penerima bantuan, seremoni penyerahan bantuan PSBI di Barito Kuala juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat, Kades, warga, dan guru SD di Barito Kuala, serta BKKBN Kalsel selaku sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/30/percepat-penurunan-stunting-bi-kalsel-serahkan-bantuan-psbi-di-batola>, 30 Mei 2023.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2023/05/30/percepat-penurunan-stunting-bi-kalsel-serahkan-bantuan-psbi-di-barito-kuala/>, 30 Mei 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, an manfaat untuk masyarakat.

- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) pemerintah pusat.
 - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
- (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.